

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Demokrasi, menurut pandangan Schumpeter, adalah ekspresi dari keinginan masyarakat dan aspirasi untuk kesejahteraan bersama (Schumpeter dikutip dalam Budiardjo, 2008). Ia berpendapat bahwa demokrasi terjadi ketika kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam pemilihan, sementara Dahl berpendapat sebuah negara menjadi demokratis ketika pemilihan umum telah diselenggarakan, hak pilih universal diberikan, dukungan oleh kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyuarakan aspirasi di muka umum (Dahl dikutip dalam Mas'ood, 2006). Singkatnya, Dahl berpendapat demokrasi merupakan tatanan politik yang sangat liberal dan partisipatif yang memungkinkan semua orang masuk dalam kompetisi dan kontestasi.

Dalam perspektif normatif, demokrasi diartikan sebagai sistem pemerintahan yang timbul dari kehendak serta partisipasi warga, dijalankan oleh mereka, dan untuk kepentingan mereka. Sementara itu, definisi sistem politik demokrasi menurut (Mayo, 1960) “*a political system described as democratic is one in which the majority shapes public policies, and these policies are executed by representatives who are responsible to the principle of political equality and operating within a structure of political freedom*” (Sistem politik yang berkarakter demokratis adalah sistem dimana kebijakan publik ditentukan oleh mayoritas,

dilaksanakan oleh wakil-wakil yang bertanggung jawab terhadap pengawasan rakyat yang efektif melalui pemilihan umum berkala yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan politik dan dalam kerangka kebebasan politik.

(Hook, 2009) berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Oleh karena itu, esensi demokrasi sebagai pijakan dalam kehidupan bersama dan pemerintahan mencakup konsep bahwa rakyat memiliki peran penentu dalam segala aspek kehidupannya, termasuk dalam mengevaluasi kebijakan negara. Hal ini disebabkan karena kebijakan tersebut akan memengaruhi jalannya kehidupan rakyat.

Selain kebijakan yang berasal dari proses demokrasi, pemilihan merupakan bagian integral dari proses demokratis. Hal ini sejalan dengan pendapat (Budiardjo, 2008) bahwa di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Hasil dari pemilihan umum yang diadakan dalam suasana transparansi, di mana kebebasan berpendapat dan berorganisasi dihargai, dianggap cukup tepat sebagai gambaran partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. (Kumolo, 2015) didalam bukunya berpendapat bahwa Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita Reformasi yang ingin mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat

yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era Reformasi. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Pada sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau demokrasi keterwakilan (*representative democracy*), dilaksanakannya pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihan harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu. (Sutrisno, 2017)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Indonesia. Dalam pelaksanaannya harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang diatur didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selain itu (Hayyi, 2009) menganggap bahwa pilkada merupakan sarana konsentrasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik lokal, untuk meningkatkan partisipasi politik tingkat daerah, legitimasi politik dapat memberikan dampak ikatan yang kuat terhadap kepemimpinan daerah terpilih, pilkada sebagai ruang untuk kompetisi secara adil antara calon yang bersaing melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal. Baik secara tahapan berlangsungnya pemilihan hingga proses politik pasca pemilihan.

Pada realitanya tidak sedikit dari para kandidat Kepala Daerah mengandalkan proses pemilihan secara struktural seperti kampanye-kampanye yang dilakukan. Para calon tersebut juga mengandalkan mobilisasi politik untuk kepentingan pemilihan. Tidak hanya melalui atau menggunakan partai politik juga melalui instrumen non Partai. (Faizin, 2017) berpendapat bahwa hal itu terjadi dikarenakan partai menyadari bahwa ada kekuatan lain di dalam demokrasi selain partai politik seperti *Intersect Group*. kelompok kepentingan (*Interest Group*) merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat.

Sebuah kelompok organisasi berpengaruh sebagai sebuah kelompok yang terorganisir dan sistematis yang dimana kelompok ini senantiasa memiliki tujuan secara kolektif untuk mempengaruhi dari setiap kebijakan-kebijakan yang akan dibuat atau yang sedang dijalankan dari sebuah *state* atau *government* (Saputra, 2021). Seiring berkembangnya zaman sebuah kelompok kepentingan dan sebuah gerakan semakin meningkat dan memiliki pengaruh yang cukup luas dalam implementasinya pada sebuah negara. Dalam sebuah jalanya system demokrasi, kelompok kepentingan dan gerakan merupakan sebuah katalisator penghubung antara yang memerintah dan yang di perintah.

Seperti yang ditulis oleh (Maiwan, 2016) di dalam jurnalnya bahwa efektivitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menggapai tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang

diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan ataupun *output* yang tepat. Di Indonesia sendiri ada banyak organisasi atau lembaga yang berlatar belakang agama Islam yang memberikan pengaruh terhadap perpolitikan di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU), LDII dan lain sebagainya. (Setiawan, 2012).

Schattschneider berpendapat bahwa dengan setiap prinsip demokrasi, partai-partai, sebagai penggerak mayoritas, memiliki klaim atas publik yang lebih sah dan lebih tinggi dari pada yang ditegaskan oleh kelompok-kelompok penekan yang memobilisasi minoritas. Schattchneider berkeyakinan terhadap manfaat aktivitas berbasis partai kini banyak dipertanyakan. Ada persepsi bahwa partai adalah “barang busuk” sebagai kendaraan partisipatif. Kelompok kepentingan bisa dianggap mengisi kekosongan ini (Jordan & Maloney, 2007). Oleh sebab itu tidak heran jika kebanyakan partai politik membangun relasi dengan oramas, organisasi atau lembaga yang memiliki pengaruh/kekuasaan (*Power*) dan basis massa yang besar.

(Budiardjo, 2008) Berpendapat bahwa Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. (Barry, 1989) menganggap kekuasaan sebagai suatu konsep yang dipertentangkan (*a contested concept*) yang artinya merupakan hal yang tidak dapat dicapai suatu konsensus. Perumusan yang umumnya dikenal ialah bahwa kekuasaan adalah kemampuan seorang pelaku untuk memengaruhi perilaku seseorang pelaku lain, sehingga perilakunya menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan.

Dinamika politik kerap kali menghadirkan pergulatan yang cukup menguras energi baik para politisi yang terlibat langsung maupun pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung didalamnya. Tidak hanya masyarakat secara personal, institusi kemasyarakatan (organisasi) yang bergerak diluar politik juga terkena dampaknya. Menjelang pemilihan umum (pemilu), persaingan antara partai politik (partai politik) menarik simpati dan dukungan suara semakin kuat. Janji-janji politik melalui penyampaian visi dan misi pembangunan negara ditawarkan secara transparan.

Di Indonesia banyak ormas atau organisasi yang berpotensi dimanfaatkan perannya (Jurdi, 2011). salah satunya adalah Alkhairaat yang merupakan organisasi/ormas terbesar di Indonesia bagian Timur dan berusia tua bahkan lebih tua dari pada usia Negara Indonesia yang baru berdiri pada tahun 1945 (Muhaimin & Wahab, 2014). Dengan memiliki usia yang tua dan kepengurusan cabang yang hampir tersebar diberbagai wilayah Indonesia bagian timur, maka dari pada itu tidak heran jika Alkhairaat memiliki pengaruh di Indonesia bagian timur khususnya di Sulawesi Tengah.

Alkhairaat adalah sebuah organisasi gerakan sosial Islam yang aktivitasnya tidak hanya berkaitan dengan bidang agama,pendidikan, ekonomi dan sosial, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap Perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Alkhairaat didirikan oleh Habib Sayyid Idrus Bin Salim Al Jufrie atau sering disapa dengan nama Guru Tua. Alkhairaat berdiri pada Tahun 1930 yang berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. (Jumat, 2012)

Serupa dengan organisasi keagamaan lainya seperti nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan LDII yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, Alkhairaat juga tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang diungkapkan oleh (Siame & Samsinas, 2015) bahwa keturunan Guru tua/ Abnaul Khairaat dalam membina umat Alkhairaat selama 39 tahun yakni 1930-1969 telah membuahkan hasil dengan tersebarnya cabang-cabang Alkhairaat hingga 420 buah yang tersebar tidak hanya di Sulawesi Tengah akan tetapi ada hingga dipelosok Indonesia bagian Timur, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Jumlah Madrasah di Setiap Provinsi Tahun 1969

No.	Nama Provinsi	Banyak Madrasah
1.	Sulawesi Tengah	338 Buah
2.	Sulawesi Utara	41 Buah
3.	Maluku	28 Buah
4.	Irian Jaya	1 Buah
5.	Sulawesi Selatan	6 Buah
6.	Kalimantan	6 Buah

Sumber : (Siame & Samsinas, 2015)

Kini sang pendiri Alkhairaat (Guru Tua) telah tiada namun Alkhairaat sebagai wadah perjuangan bangsa dalam bidang pendidikan Islam terbesar di Indonesia bagian Timur yang diwariskan kepada seluruh Abnaul Khairaat sebagai generasi penerus yang sekarang yang berada di bawah kepemimpinan Habib Saggaf

Bin Muhammad Al Jufrie terus mengalami perkembangan. Hingga kini telah mencapai kurang lebih 2000 buah cabang Alkhairaat dengan berbagai jenjang pendidikan tingkat rendah sampai perguruan tinggi (UNISA). Pendidikan ini juga terdiri dari dua bagian yakni pendidikan agama dan pendidikan umum (Nurinayah, 2020). Maka dari pada itu tidak mengherankan dengan jumlah kader yang menyebar diseluruh Cabang-cabang Alkhairaat di Indonesia bagian Timur sebanyak data yang disajikan diatas, Alkhairaat bisa di katakan sebagai kekuatan politik.

Kedekatan kader Alkhairaat dengan partai politik, tentunya menghadapkan mereka pada dua misi sekaligus, yakni pendidikan keagamaan dan politik kenegaraan. Kedua misi tersebut, adalah lahan yang jelas menuntut dinamisasi dan penalaran intelektual dengan segala macam systemnya. Artinya, para Kader Alkhairaat yang memiliki kepemimpinan intelektual, punya dua wajah fundamental garapan penalaranya. Kerangka pemikiran inilah yang dikembangkan oleh kader yang memiliki gagasan pendidikan di bawah naungan organisasi dalam mengambil sikap politik yang kemudian di ikuti oleh kader intelektual (Rasyid, 2018).

Kepada kader Abnaul Khairaat, Alkhairaat memberikan kebebasan untuk bergerak dalam melanjutkan perjuangan organisasi dengan jalan masuk kepartai politik, sejauh tidak merugikan Alkhairaat. Uniknya, kecenderungan politik kader Alkhairaat masih memegang prinsip Ta'at kepada pemimpin (Guru tua dan Penerusnya), yakni *Sami'na wa atho'na*. prinsip inilah yang membuat ikatan emosional itu masih ada sampai sekarang (Rasyid, 2018).

Ada banyak kader atau Abnaul Khairaat yang terjun di dunia politik seperti Habib Saggaf Al Jufrie yang pernah menjabat sebagai Anggota MPR RI di Era Orde baru, Ustad. Rustam Arsyad yang pernah menjabat sebagai DPRD dan anggota MPR RI, Fadel Muhammad yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo dan Menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Habib Sholeh Al jufrie yang menjabat Anggota DPD RI hingga saat ini, Ridwan Yalidjama yang menjabat sebagai anggota DPRD Sulawesi Tengah, dan Zakinah Al Jufrie yang menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 dan masih banyak lagi Abnaul khairaat yang menjadi anggota parlemen dan dipemerintahan.

Di dalam praktik politik praktis ada banyak bukti keterlibatan Alkhairaat ikut dalam politik Praktis seperti salah satunya ialah melihat Fenomena Pada Pemilihan kepala daerah 2015 di Sulawesi Tengah yang dimuat oleh Media Cetak Kompasiana yang mana pertarungan Longki Djanggola-Sudarto dan Rusdi Mastura-Ihwan Datu Adam. Pilkada 2015 Alkhairat dengan terang-terangan mendukung Rusdi Mastura yang ditandai dengan keluarnya Maklumat bernomor Istimewa/KUT.A/2015, di tanda tanggani oleh H.S. Saggaf Aljufrie selaku Ketua Utama Alkhairaat pada tanggal 17 Agustus 2015.

Sikap perubahan politik Alkhairaat pada 2015 tentu saja menimbulkan polemik di internal Alkhairaat dan juga Abnaulkhairaat. Karena bagi mereka Abnaul Khairaat maklumat tersebut dianggap sebagai sebuah fatwa ulama mereka dan harus menaatinya, namun bagi mereka yang menganggap itu keputusan politis karena hak yang melekat pada pribadi Ketua Utama Alkhairaat sebagai hak warga

Negara yang menentukan sikap politiknya maka bisa saja para Abnaukhairaat memiliki pilihan politik yang berbeda dari keputusan Ketua Utama Alkhairaat.

Alasan Alkhairaat mendukung pasangan Rusdi mastura beragam, berdasarkan rilis media online Antara News 17 oktober 2015, Ketua Utama memiliki alasan bahwa ini demi kepentingan umat bukan kepentingan individu atau material, ketua utama Alkhairaat melihat cudi sapaan akrab Rusdi mastura harapan bagi Umat khususnya masyarakat Sulawesi tengah, terutama bagi keluarga besar Alkhairaat.

Dukungan ini menjadi kabar gembira bagi pasangan calon Kepala Daerah Rusdi Mastura – Ihwan Datu Adam yang akan mengikuti pemilu, yang berarti pengaruh Alkhairaat yang signifikan ini memberikan banyak pemilih kepada Rusdy Mastura (Ishak & Agustiyara, 2017). Karena mengingat bahwa Alkhairaat adalah salah satu kekuatan besar di Sulawesi Tengah yang memiliki basis masa yang banyak.

Selain dari keterlibatannya di dalam Pilkada dan Pemilu, Alkhairaat juga memiliki peranan terhadap kebijakan Daerah maupun kebijakan tingkat Nasional hal tersebut dapat dilihat dari Undang-Undang tentang Pondok Pesantren yang sejalan dengan tujuan dari Alkhairaat yaitu Pendidikan dan Dakwah serta ditetapkannya Lingkungan Alkhairaat sebagai kawasan Wisata Religi. hal ini sejalan dengan prinsip dasar dari Kelompok kepentingan (Interest Group) yaitu bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan agar berkesesuaian dengan tujuan kelompoknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, di mana Alkhairaat memiliki pengaruh terhadap Perpolitikan Lokal Sulawesi Tengah. maka penelitian ini akan menganalisis Peran Alkhairaat sebagai Kekuatan Politik Lokal di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Alkhairaat sebagai kekuatan politik lokal di Kota Palu?
2. Bagaimana bentuk Aktualisasi Alkhairaat sebagai kekuatan politik lokal di Kota Palu?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk aktualisasi Alkhairaat sebagai kekuatan politik lokal di Kota Palu, serta mengkaji perkembangan Alkhairaat sebagai kekuatan politik lokal di Kota Palu.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah mendapatkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulisan menguraikan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian teoritis tentang bagaimana organisasi lokal seperti Alkhairaat dapat menjadi kekuatan politik lokal. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyediakan

pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme partisipasi politik masyarakat lokal di Kota Palu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembandingan untuk kajian teoritis lain tentang bagaimana organisasi lokal dapat menjadi kekuatan politik

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Kota Palu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat tentang peran Alkhairaat sebagai kekuatan politik lokal di Kota Palu. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah lokal, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam membangun proses politik yang inklusif di Kota Palu.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kelompok Kepentingan dalam Sistem Politik

Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasal dari tiga kata, yaitu sistem, politik, dan Indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu “Systema” yang :

- a) Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (Shorode dan Voich, 1974:115);
- b) Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (Awad, 1979:4)

Dengan demikian, kata “systema” berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan satu keseluruhan (*a whole*). Dalam perkembangannya, istilah itu mengalami pembiasaan sehingga memiliki banyak arti, bergantung pada objek dan cakupan pembicaraannya. Akan tetapi setiap definisi mewujudkan gagasan dari sekelompok objek atau unsur yang berada dalam hubungan struktural dan karakteristiknya masing-masing yang satu dan lainnya berinteraksi pada dasar karakteristik tertentu.

Efektivitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menggapai tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta masuknya dalam bentuk kebijakan ataupun *output* yang tepat. Hasil dari setiap kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul yang merupakan konsekwensi dari beragamnya kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam sistem politik, tidak semua aspirasi yang muncul dapat disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik formal seperti partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga kekuatan lain yakni kelompok kepentingan (*Interest Group*).

Maka sistem politik dapat juga dipahami dengan menguraikan atau menjabarkan setiap kata yang membentuk istilah sistem politik sehingga sejauh mungkin dapat diterima oleh umum (Anggara, 2013). Dewasa ini dalam mempelajari sistem politik ada dua perwujudan pendekatan sistem, yakni : teori analisis sistem yang dikembangkan oleh david easton dan teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Gabriel Almond. Teori analisis sistem berasumsi bahwa

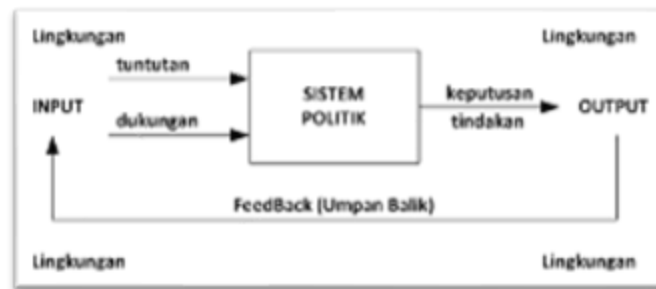
setiap sistem memiliki sifat (1) terdiri dari banyak bagian-bagian; (2) bagian-bagian saling berinteraksi dan ketergantungan; (3) sistem itu memiliki perbatasan yang memisahkannya dari lingkungan yang terdiri dari sistem-sistem lain juga (Mas'ood & MacAndrews, 2000).

Selanjutnya Easton memberikan definisi sistem politik adalah bagian dari sistem sosial yang menjalankan (a) alokasi nilai-nilai (bentuk-bentuk keputusan/kebijakan-kebijakan, (b) dialokasikan dengan kekuasaan yang sah, (c) mengikat seluruh masyarakat. Dalam masyarakat modern, otoritas/kekuasaan yang sah memiliki wewenang yang sah untuk menggunakan kekuasaan dan paksaan berbentuk negara. Teori struktural fungsional yang dikembangkan oleh Gabriel Almond berasumsi bahwa setiap sistem politik harus terdapat fungsi-fungsi demi berlangsungnya sistem politik itu sendiri (Easton, 1957).

Menurut David Easton, sistem politik adalah sistem interaksi dalam setiap masyarakat di dalamnya dibuat alokasi yang mengikat atau bersifat otoritatif di implementasikan. Easton memandang kehidupan politik sebagai suatu sistem yang terdiri dari aktivitas yang saling berkaitan. Aktivitas itu menemukan hubungan-hubungan atau ikatan sistemiknya dari kenyataan bahwa aktivitas itu mempengaruhi bagaimana keputusan otoritatif dirumuskan dan dilaksanakan. Bila kehidupan politik dipandang sebagai suatu sistem aktivitas, maka dijumpai suatu konsekuensi tertentu dari cara melakukan analisis mengenai operasi suatu sistem.

Masukan-masukan (*Input*) yang datang dari komponen lain dalam sistem merupakan energi bagi sistem itu sendiri yang menyebabkan sistem itu

berjalan. Masukan itu dikoversi oleh sistem politik sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang otoritatif. Kebijakan-kebijakan ini mempunyai konsekuensi terhadap masyarakat lingkungannya.



Gambar 1. Model Teori Sistem Politik David Easton

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industrial (*post industrial*) dan dinamakan gerakan sosial baru (*new social movement*). Kelompok-kelompok ini kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada suatu masalah tertentu (*singel issue*) saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui *direct action*. (Budiardjo, 2008).

1.5.2 Kelompok kepentingan Sebagai Kekuatan Politik

Dalam kepustakaan sosiologi dan ilmu politik dikenal konsep *interest group* atau *pressure group*. Meskipun secara harafiah arti dari kedua konsep tersebut berbeda, tetapi fungsinya sama yaitu melakukan tekanan kepada pemerintah. Oleh Almond *interest group* atau kelompok kepentingan diartikan sebagai “setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa (pada waktu yang sama) berkehendak memperoleh jabatan publik, yaitu jabatan politik dalam pemerintahan. (Almond, 1981: 50). konsep ini di pertentangkan dengan partai politik, di mana yang terakhir ini benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan politik. Perbedaan penting lainnya adalah suatu partai mengikuti pemilihan umum selalu berusaha untuk memenangkannya guna menjalankan atau merealisasikan ideologi dan program-programnya. Sebaliknya, suatu kelompok kepentingan tidak pernah ikut pemilihan umum. (Suwadji, 2018)

Schattschneider berpendapat bahwa dengan setiap prinsip demokrasi, partai-partai, sebagai penggerak mayoritas, memiliki klaim atas publik yang lebih sah dan lebih tinggi daripada yang ditegaskan oleh kelompok-kelompok penekan yang hanya memobilisasi minoritas. Keyakinan Schattschneider terhadap manfaat aktivitas berbasis partai kini banyak dipertanyakan. Ada persepsi bahwa partai adalah “barang rusak” sebagai kendaraan partisipatif. Kelompok kepentingan dianggap mengisi kekosongan ini. (Jordan & Maloney, 2007)

Berry (1984:43) berpendapat bahwa inti dari filosofi kepentingan publik adalah bahwa partai politik tidak dapat dipercaya. Partai tidak murni; mereka

mendukung kompromi daripada prinsip-prinsip yang diperjuangkan dengan keras. Dengan demikian, peningkatan jumlah dan ukuran kelompok kampanye (khususnya kelompok kepentingan publik) telah menyiratkan pergeseran saluran utama politik (dari partai ke kelompok), dan diduga meningkatkan demokrasi partisipatif melalui organisasi dengan pandangan yang lebih jelas.

Dalam masyarakat modern, otoritas/kekuasaan yang sah memiliki wewenang yang sah untuk menggunakan kekuasaan dan paksaan berbentuk negara. Teori struktural-fungsional yang dikembangkan oleh Gabriel Almond berasumsi bahwa setiap sistem politik harus terdapat fungsi-fungsi demi berlangsungnya sistem politik itu sendiri. Secara umum ciri yang dimiliki sistem politik dibagi dalam dua bagian, yakni: fungsi input berupa: artikulasi kepentingan, sosialisasi politik dan rekrutmen politik; fungsi output yaitu pembuatan, penerapan, penghakiman kebijakan. Struktur politik diartikan suatu interaksi yang dianggap sah, tujuannya mempertahankan dan memelihara tata masyarakat (Mas'ood & MacAndrews, 2000)

Efektivitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan politik maupun dukungan yang diterima serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan atau output yang tepat. Hasil dari setiap kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul yang merupakan konsekuensi dari beragamnya kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam sistem politik, tidak semua aspirasi yang muncul dapat disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik formal seperti partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai

penyalur aspirasi, tetapi juga kekuatan lain yaitu kelompok kepentingan (interest Group). (Maiwan, 2016)

Dalam tahap tertentu, keterbatasan partai politik, baik karena sumber daya material, sumber daya manusia, orientasi ideologi, kultur faksionalisme, kepentingan jangka pendek, minat terhadap isu, keterbatasan jaringan, masalah komunikasi, hubungan personil, dan lain-lainya menyebabkan mereka terkadang tidak cukup dapat diharapkan untuk menyampaikan aspirasi dalam masyarakat secara efektif. Keadaan ini menyebabkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan.

Adapun cara atau strategi yang dipakai untuk mempengaruhi pemerintah menurut (Janda, Berry dan Goldman) adalah:

1. *Pertama*, melakukan *lobbying* menjalin komunikasi langsung dengan para pejabat pemerintah yang terkait, atas isu yang diperjuangkan. (Cummings & Wise, 2007) Mendefenisikan lobby *sebagai communication with legislator or other goverenment officials to try to infuance their decision*. Kelompok-kelompok kepentingan, khususnya yang kuat, tidak jarang memiliki pelobby-lobby khusus atau menyewa seorang pelobby profesional yang memiliki kemampuan khusus di bidang tersebut.
2. *Kedua*, melalui media massa. Kelompok kepentingan biasanya menggunakan media massa sebagai sarana untuk menarik sentimen serta perhatian umum, sehingga pemerintah mengambil kebijakan atas isu tertentu sesuai yang diinginkan. Pesan-pesan yang disampaikan melalui

media diharapkan segera mendapat respon yang memadai dari pemerintah. Namun melalui cara ini tidak ada kontak langsung dengan pejabat pemerintah.

3. *Ketiga, grass-roots pressure*, dimana kelompok kepentingan menggalang dukungan masyarakat lapis bawah untuk menyampaikan isu-isu tertentu. Misalnya melalui rapat akbar, pawai massal, demonstrasi, aksi teatrikal di tempat-tempat umum ataupun gedung pemerintah. Melalui cara ini memang ada kontak langsung dengan pejabat pemerintah, tetapi terbatas, dan mungkin saja manipulatif dan situasional.

Adakalanya kelompok kepentingan menggunakan ketiga cara diatas secara serentak dalam mempengaruhi pemerintah. Hal itu dilakukan sebagai cara yang mungkin dipandang efektif menyangkut isu-isu tertentu. Namun demikian, keberhasilan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi agenda pemerintah memiliki kadar yang berbeda-beda antara satu sistem politik dengan sistem politik yang lain. Oleh karena itu, beberapa aspek yang turut menentukan pengaruh kelompok kepentingan yakni, aspek budaya, politik, struktur kelembagaan, watak, dan sistem partai, watak dan gaya dalam kebijakan publik (Janda, Barry dan Goldman., 1997:73).

Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, penelitian ini akan membincangkan tentang

kewujudan kelompok kepentingan, serta pengaruh dan kedudukannya dalam sistem politik. Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak di tumpuhkan pada partai politik. Padahal dalam kenyataanya seiring dengan membaiknya kehidupan masyarakat dan munculnya sektor-sektor baru dalam kehidupan menyebabkan keberadaan kelompok kepentingan perlu di perhitungkan secara politik.

Kelompok kepentingan (*interest group*) seringkali didefinisikan sebagai, *a group of persons who share a common cause, which puts them into political competition with other groups of interests* (Benditt 1975:34). Berdasarkan definisi tersebut fungsi kelompok kepentingan terbatas pada agregasi dan artikulasi kepentingan saja. Mereka merupakan kelompok terorganisir yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan (Janda, Berry, & Goldman 1997). Dengan kata lain, tujuan mereka hanyalah berusaha untuk “mempengaruhi” proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang di wakيلinya.

Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis: *Pertama*, kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul, seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik rendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini lebih merupakan terobosan kedalam sistem politik berhubung dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustrasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun

demikian, setelah aspirasi mereka di dengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar.

Kedua, kelompok Nonassosional, yang merupakan kelompok kepentingan yang di organisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas. Kelompok Non Assosional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial.

Ketiga, kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (Ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan dan lain-lainnya), di samping itu tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Contohnya ialah: Organisasi Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Ikatan Cendekiawan Muslim Se- Indonesia, dan Lain-lain.

Keempat, Kelompok kepentingan Assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang

menjadi fokusnya. Contohnya adalah : organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan lain-lain.

Dari keempat jenis kelompok kepentingan di atas, yang paling efektif dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat adalah kelompok kepentingan Institusional dan Assosiasional. Sementara pada derajat yang rendah, yang paling tidak efektif adalah kelompok anomik serta Non Assosiasional. Dalam banyak hal kelahiran kelompok kepentingan hampir mirip dengan partai-partai politik. Hanya saja partai politik lebih di Orientasikan pada upaya untuk memenangkan suara pemilih dan menduduki jabatan-jabatan dalam kekuasaan. Di Indonesia, beberapa kelompok kepentingan telah lahir mendahului partai-partai politik. Mereka bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan. Sebagian di antaranya malah menjadi cikal bakal partai politik. Beberapa kelompok kepentingan yang awal di Indonesia muncul pada era kolonial seperti : Serikat Dagang Islam (SDI), Al- Irsyad, Muhammadiyah, Serikat-serikat Buruh, pekerja kereta api, Taman siswa, organisasi Koperasi, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain, menjadi pelopor awal dalam munculnya politik kelompok. Organisasi-organisasi tersebut sebagian bertransformasi menjadi besar dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Berdasarkan teori yang di paparkan di atas bisa disimpulkan bahwa Organisasi/Lembaga Alkhairaat bisa di kategorikan sebagai kelompok kepentingan jenis kelompok Institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang

melembaga secara formal, dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Budaya, Seni, Hukum, Keluarga, Lingkungan, dan lain-lain), disamping itu tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki.

Menurut (Budiardjo, 2008) tujuan kelompok ini ialah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka. Kelompok-kelompok ini kemudian berkembang menjadi gerakan sosial (*social movement*). (Tarrow, 2022) dalam bukunya *power in Movement* berpendapat bahwa *Social movements* adalah tentang kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas, (yang dilaksanakan) melalui interaksi secara terus menerus dengan para elite, lawan-lawanya, dan pejabat-pejabat (*social movements are collective challenges by people with common purposes and solidarity in sustained interaction with elites, opponents and authorities*). Gerakan ini merupakan bentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama.

Disamping itu, salah satu definisi lain mengenai kelompok kepentingan adalah: “satu organisasi yang berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik dalam suatu bidang yang penting untuk anggota-anggotanya (*an organization that attempts to influence public policy in a specific area of importance to its members*) (Ethridge & Handelman, 2014).

Dalam prakteknya ada berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai pemain nonpemerintah, mereka dapat berupa: kelompok profesional, persatuan buruh, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain-lain.

Kekuatan mereka berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, perumusan kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah. Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi adakalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingan.

1.5.3 Konsep Kekuatan/kekuasaan Politik

Kekuasaan dimaknai sebagai kekuatan, kekuatan merupakan definisi klasik dalam literatur ilmu politik. Pemaknaan kekuasaan ini lebih mengandalkan pada kekuatan fisik semata. Kekuasaan terkonsepsi sebagai kekuatan fisik atau paksaan tergambarkan pada pemikiran/pendapat para ahli. Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif

maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalism (Hays 2011:122). sedangkan Yohanes Laba Maran dan Tadjudin N Efendy mereka berpendapat bahwa kekuasaan diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok individu untuk membatasi keinginan kelompok lain, dan cegah keinginanya dikuasai oleh kelompok tersebut (Haboddin, 2017).

(Weber, 1925) berpendapat bahwa kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat yang sama, mereka berpendapat bahwa kekuasaan adalah suatu hubungan di mana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.

Kekuasaan dapat berbentuk dan diraih secara sah (konstitusional) dalam bentuk pemilihan umum, perwakilan keturunan atau secara tidak sah (inkonstitusional) dalam bentuk kudeta, perang atau penggulingan kekuasaan secara konspirasi. Perebutan kekuasaan ini harus lah menggunakan politik, adapun pengertian politik menurut (Kartono, 1989) secara kelembagaan adalah ilmu pengetahuan mengenai kekuasaan. Politik juga dapat diartikan sebagai alat untuk merebut kekuasaan baik secara sah maupun tidak sah dan juga sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan tersebut.

Kekuasaan senantiasa ada di dalam setiap masyarakat baik yang masih bersahaja, maupun yang sudah besar atau rumit susunanya. Akan tetapi walaupun

selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Justru karena pembagian yang tidak rata tadi timbul makna yang pokok dari kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan (Sentra & Andri, 2022). Jadi kekuasaan bisa didefinisikan sebagai hasil pengaruh yang diinginkan seseorang atau sekelompok orang. Adapun sumber kekuasaan menurut (Budiardjo, 2008) dapat berupa Kedudukan, kekayaan atau kepercayaan.

1.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual masih dalam bentuk konsep dan oleh sebab itu masih bisa dipahami secara intuitif, tetapi masih merupakan definisi yang sangat abstrak (Azwar, 2010). Berdasarkan pemaparan di atas, bisa dipaparkan definisi konseptual terdiri dari beberapa variabel yang ada.

1. Kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme.
2. Kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan suatu kumpulan individu-individu ataupun masyarakat yang memiliki kepentingan yang dapat dipertahankan demi terciptanya kelangsungan hidup setiap warga negara, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara dalam rangka mencapai dan mempertahankan sebuah kepentingan, tentu saja memerlukan sebuah usaha,

kerja keras dan sebuah perjuangan yang semuanya saling bersentuhan antar individu atau masyarakat.

3. Politik Lokal adalah merupakan salah satu bagian dari sistem politik yang dijalankan oleh suatu Negara. Konteks lokal dalam hal ini menyiratkan pada pemaknaan heterogenitas masyarakat lokal (daerah) yang memiliki kesejarahan, situasi batin dan psikologi yang berbeda.

1.7 Definisi Operasional

1. Perkembangan Alkhairaat sebagai kekuatan politik lokal
 - a) Perubahan orientasi gerakan
 - b) Perubahan strategi
 - c) Kaderisasi
2. Bentuk aktualisasi Alkhairaat sebagai kekuatan politik
 - a) Pemilu dan Pilkada
 - b) Kebijakan Daerah

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menggunakan pendekatan untuk menggali dan memahami makna dari isu-isu sosial dan kemanusiaan Creswell (2008). Dalam penelitian ini, penulis mengambil data melalui literasi, observasi lapangan, serta melakukan wawancara secara purposiv sampling. proses penentuan

metode yang akan dipergunakan berdasarkan masalah yang hendak dijawab atau dimengerti.

1.8.2 Situs penelitian

Tempat penelitian ialah tempat untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan dengan menangkap keadaan sebenarnya dari suatu subjek penelitian (Nasution, 1996). Berdasarkan pemaparan diatas, lokasi studi ini dilakukan di PB Alkhairaat yang bertempat di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

1.8.3 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk mendapatkan informasi atau data untuk kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, yang memfokuskan diri pada perhatian dengan berbagai metode yang mencakup pendekatan Interpretatif dan Naturalistik terhadap subjek kajiannya. Peneliti memulai penelitiannya dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari para partisipan, lalu membentuk informasi ini menjadi kategori atau tema tertentu (Creswell, 2014). Sedangkan lokasi penelitian ialah di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Sasaran penelitian Tokoh-Tokoh Politik Lokal, Elit Alkhairaat serta Akademisi yang paham dengan persoalan politik lokal.

Metode penelitian kualitatif (Naturalistik) adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dengan metode itu, peneliti dapat belajar mengeksplorasi dan memahami pengalaman manusia dan atau kelompoknya, seperti kepercayaan, penderitaan, rasa sakit, keindahan,

pengharapan, dan yang telah terbentuk dan di alami manusia sebagai hidup sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari.

1.8.4 Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Sugiyono (2016: 225) berpendapat bahwa data primer adalah merupakan sumber data yang meneruskan data secara langsung pada pengumpulan data. Untuk data primer didapatkan melalui hasil wawancara dari pihak yang terkait tentang alkhairaat dan aktivitasnya diantaranya Pengurus Besar Alkhairaat, Aktivis Alkhairaat, akademisi dan pemerintah Kota Palu.

Sedangkan data sekunder menurut Hasan (2002: 58), adalah informasi yang dikumpulkan atau di temukan oleh peneliti dari sumber penelitian yang suda ada sebelumnya. Informasi ini digunakan untuk menyokong informasi primer yang suda dikumpulkan dari artikel, buku, sumber pustaka, penelitian sebelumnya serta sumber lainnya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

a) Wawancara

Wawancara merupakan perangkat untuk memproduksi pemahaman situasional yang bersumber dari episode-episode interaksional khusus. Metode ini sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal seorang peneliti, termasuk ras, kelas sosial, kesukuan dan gender (Denzin & Lincoln, 2011).

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara yang terstruktur dan sistematis, dimana pewawancara mengidentifikasi, menetapkan masalah dan pertanyaan yang di ajukan untuk mencari jawaban jadi melalui wawancara, penulis akan menemukan informasi yang lebih mendalam tentang partisipan sekaligus menjelaskan situasi dan fenomena yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.

Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur dan sistematis yaitu dengan menyusun terlebih dahulu pertanyaan yang akan di ajukan kepada informan. Teknik ini bertujuan agar arah dan fokus pembicaraan dalam wawancara lebih terarah pada tujuan yang dimaksud, dan untuk menghindari pembicaraan yang terkesan tidak penting. Wawancara adalah interaksi antara dua orang yaitu peneliti dan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi melalui tanya jawab. Peneliti mendatangi narasumber lalu memberikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa pertanyaan yang terkait peranan Alkhairaat sebagai kekuatan Politik lokal di Sulawesi Tengah. Adapun informan wawancara Pada penelitian ini adalah PB Alkhairaat, Akademisi, Aktivis Alkhairaat serta Pemerintah Kota Palu

b) Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam tradisi kualitatif, data

tidak akan diperbolehkan dibelakang meja, tetapi harus terjun kelapangan, ketetangga, keorganisasi ke komunitas. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tetntang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam organisasi (Dr. J. R. Raco, 2010).

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan di observasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan mendesign cara merekam wawancara tersebut. Wawancara yang sudah direkam harus dijaga dan ditempatkan di tempat yang baik, sehingga kualitas suara partisipan tetap terjamin, karena nantinya akan diputar kembali dan didengar berkali-kali untuk dianalisis. Dalam penggunaan observasi ini, dilakukan observasi terhadap segala sesuatu yang dapat diamati dari peranan Alkhairaat terhadap dinamika perpolitikan Sulawesi Tengah Khususnya di Kota Palu.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang suda ada sebelumnya seperti foto, buku , gambar, catatan literatur, serta hasil penemuan dari peneliti terdahulu. Dokumentasi

diperlukan untuk melengkapi wawasan peneliti mengenai hal-hal berbau topik penelitian yang pernah terjadi sebelumnya sehingga penelitian tidak terbatas pada ruang dan waktu.

d) Penafsiran/Analisis Data

Dalam metode kualitatif, penafsiran dan analisis berjalan sejajar. Itu berarti bahwa pada waktu peneliti menganalisis data, pada saat yang sama dia sedang menafsirkan juga. Bahkan menurut para ahli, penafsiran sudah dimulai sejak awal data dikumpulkan. Jadi, penafsiran sebenarnya tidak dibuat diakhir penelitian.

Ada beberapa tujuan atau jenis penafsiran. Pertama, penafsiran yang memperkuat teori, gagasan, konsep, hasil temuan peneliti sebelumnya (confirmation). Kedua, penafsiran yang memperjelas teori, gagasan, konsep, pandangan atau hasil penelitian sebelumnya yang belum jelas. Ketiga, penafsiran yang bertujuan memperjelas apa yang tersembunyi (Dr. J. R. Raco, 2010).

e) Kesimpulan

Sesudah analisis dan penafsiran selesai dibuat, maka bagian terakhir dari penelitian adalah membuat laporan hasil penelitian. Pada bagian akhir laporan hasil penelitian berisi tentang diskusi dan kesimpulan. Kesimpulan adalah merupakan langkah keempat meliputi makna yang telah disederhanakan, disajikan dalam penyajian data dengan mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi

yang memungkinkan dipresdiksikan hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.